

KARYA TULIS

E-MODUL INTERAKTIF MATERI “HUBUNGAN ADMINISTRASI
NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK”

PETUNJUK PENGGUNAAN MEDIA

- Halaman utama terdapat dua pilihan yaitu  dan 
- Pilih tanda  untuk ke halaman utama
- Pilih  untuk menampilkan materi selanjutnya dan pilih  untuk tampilan sebelumnya
- untuk memulai mengerjakan evaluasi pilih 
- Pilih tombol , tombol , tombol  dan tombol  untuk memberikan jawaban. Soal berikutnya akan muncul jika anda telah memilih jawaban.
- Untuk memperoleh nilai, silahkan pilih tombol 

HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK



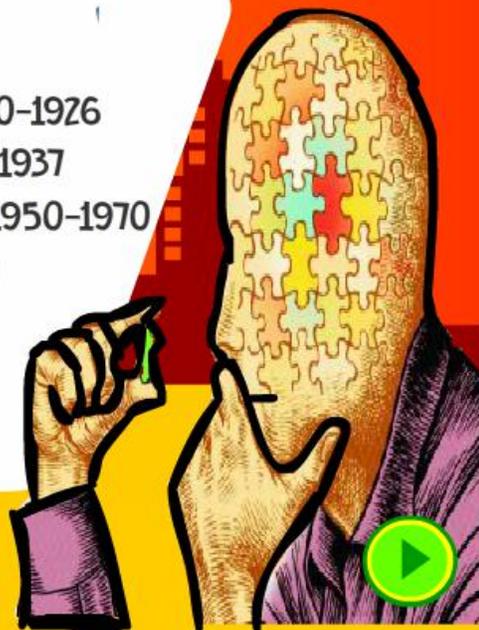
Powered by :

Dra. Rosalina Ginting, M.Si
Dr. Maryanto, M.Si
Ika Menarianti, M.Kom.



Nicholas Henry membagi paradigam administrasi Negara yaitu :

- 1) Dokotomi Politik-Administrasi, 1900-1926
- 2) Prinsip-Prinsip Administrasi, 1927-1937
- 3) Administrasi sebagai Ilmu Politik, 1950-1970
- 4) Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi, 1956-1970)
- 5) Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara, 1970 n





Pemerintah memiliki 2 fungsi:
Fungsi Politik berkaitan dengan kebijakan negara dan Fungsi Administrasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan negara

Paradigma 1 : Dikotomi Politik-Administrasi 1900-1926

Perbedaan didasarkan pada pemisahan kekuasaan yaitu lembaga legislatif (DPR) dan lembaga Yudikatif membuat kebijakan, sedang lembaga Eksekutif melaksanakan kebijakan



Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi, 1927-1937

Pusat perhatian paradig ini pada "focus" administrasi Negara yaitu mengemukakan adanya prinsip-prinsip administrasi dalam setiap jenis organisasi apapun

Sedangkan aspek "locusnya" bersifat ubikitos (berada dimana-mana) karena sekali prinsip akan terus menjadi prinsip dan sekali administrasi akan tetap administrasi

Beberapa contoh prinsip administrasi oleh Luther H Gulick and Lyndall Urwick (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting/ POSDCRB), George R Terry (Planning, Organizing, Actuating, Controlling/POAC)



Paradigma 3: Administrasi sebagai Ilmu Politik, 1950-1970



Administrasi Negara kembali pada induk disiplinnya yaitu ilmu politik dan Focusnya adalah birokrasi pemerintahan tetapi focusnya semakin berkurang

Paradigma ini merupakan upaya untuk membangun kembali hubungan konseptual antara administrasi Negara dengan ilmu politik, tetapi administrasi Negara telah kehilangan karakteristiknya dimana wilayah, tekanan dan pengertiannya sinonim dengan ilmu politik.

Tahun 1962-1967 administrasi Negara mulai kehilangan kaitan dengan ilmu politik dan para ahli politik kurang berminat pada administrasi Negara sehingga para sarjana tersebut merasa "sebagai warga Negara kelas dua"



Paradigma 4

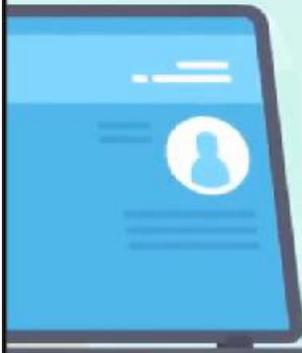


Sarjana Administrasi Negara yang merasa sebagai warga Negara kelas dua mulai mencari alternative lain yaitu : Ilmu Administrasi yang merupakan studi gabungan teori organisasi dan Ilmu Menegemen.

Tahun 1960-an lahirlah "pengembangan Organisasi" sebagai bagian dari ilmu administrasi yang begitu cepat spesialisasi ini menarik perhatian para sarjana administrasi Negara

Tetapi kemudian muncul masalah pemisahan antara "public" administration dan "private" administration, sehingga pada paradig ini belum mampu mengatasi masalah "locus" administrasi Negara.

Dengan demikian administrasi Negara perlu mencari paradig baru yang dapat mencakup "locus" maupun "locus" administrasi Negara.



Administrasi Negara sbg Ilmu Administrasi, 1956-1970





Paradigma 5: Administrasi Negara sbg Administrasi Negara, 1970 - ...

Focus administrasi Negara dalam bentuk ilmu administrasi Negara yang murni belum diketemukan, tetapi setidaknya perkembangan teori organisasi sudah cukup ditambah terjadinya perkembangan baru dalam teknik teknik terapan dalam ilmu manajemen.

Kedudukan (locus) administrasi Negara yang sudah mulai mapan (stabil) di Negara-Negara maju mulai goyah dengan adanya spesialisasi baru yaitu comparative public administration (perbandingan administrasi negara) yaitu adanya keragaman administrasi Negara di Negara-negara berkembang.

Nicholas Henry mengemukakan adanya paradigma administrasi Negara yang baru, focusnya adalah teori organisasi (organization theory) dan ilmu manajemen (management science) dan locusnya adalah kepentingan publik (public interest) dan masalah-masalah publik.



Denhardt membagi paradigma administrasi Negara dalam 3 (tiga) paradigma yaitu:



Old Public Administration (OPA)

Paradigma ini tidak bisa dilepaskan dari paradigma klasik administrasi Negara (Nicholas Henry);



New Public Management (NPM)

Paradigma ini discover dari pemikiran-pemikiran entrepreneurial governmentnya Osborne dan Gaebler



New Public Service (NPS)

Paradigma ini dikembangkan dari teori demokrasi dengan lebih menghargai perbedaan, partisipasi dan hak asasi warga Negara.



Pergeseran Paradigma Administrasi Negara

Aspek	Old Publik Administration	New Publik Management	New Public Service
Dasar teori dan fondasi epistemology	Teori Politik	Teori Ekonomi	Teori Demokrasi
Konsep kepentingan public	Kepentingan public secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum	Kepentingan public mewakili agregasi kepentingan individu	Kepentingan public adalah hasil dialog berbagai nilai
Responsivitas Birokrasi Publik	Clients dan constituent	Customer	Citizen's
Peran Pemerintah	Rowing	Steering	Serving
Akuntabilitas	Hirarki Administratif dengan jenjang yang tegas	Bekerja sesuai Dengan Kehendak Pasar (keinginan pelanggan)	Multi aspek: akuntabilitas hukum, nilai-nilai, komunitas, norma politik, standar profesional
Struktur Organisasi	Birokratik yang ditandai dengan otoritas topdown	Desentralisasi Organisasi dengan control utama berada pada para agen	Struktur kolaboratif dengan pemilikan yang berbagi secara internal dan eksternal
Asumsi pada Inovasi pegawai administratif	Deji dan keuntungan, poteksi	Semangat Entrepreneur	Pelayanan public dengan keinginan Melayani masyarakat



Periode Klasik

Dalam pengembangan teori organisasi klasik Administrasi memberikan Sumbangan besar (gagasan Teylor, Fayol, Bernard)

Administrasi Berkembang luas di Eropa Daratan (Prusia, Prancis)

Raja Prusia (Frederick William I 1713/1740) Mengembangkan korp Pegawai Pemerintahan Yang profesional

Periode Modern

Terjadi hubungan terbalik, teori organisasi memberikan sumbangan besar pada pengembangan ilmu administrasi

Teori Sistem memberi peluang berkembangnya studi komparatif administrasi (FW Riggs, 1962) melalui fase : 1).Pergeseran studi normative empiris 2).Pendekatan ideografic-nomotetik, 3).pendekatan ecological

Michael Crozier (The Bureaucratic Phenomenon 1964) membahas 2 organisasi public di Prancis, peran administrasi mulai dominan

Periode Post-Modern

Di Era Post-Modern teori organisasi berkembang sejalan dengan ilmu administrasi

Berkembang kajian post-modern dalam ilmu administrasi berupa kecenderungan untuk mengkaji ulang birokrasi serta mengembangkan model pemerintahan yang efektif-efisien meminjam gagasan organisasi bisnis

Th, 1990 di Eropa, Amerika berkembang Pemikiran Menyesuaikan organisasi pemerintahan dengan kecenderungan baru masyarakat industry



Periode Klasik	Periode Modern	Periode Post-Modern
<p>Prancis(Napoleon Bonaparte 1799 mengembangkan organisasi ber-dasarkan bahan-bahan ilmu admi-nistrasi, termasuk MaxWeber mengembangkan konsep birokrasi berdasarkan model birokrasi tra-disional Prusia berdasarkan sistem feodal</p>	<p>Konsep Administrasi HODGKINSON di era modern makin dominan dibanding-kan managemen</p>	<p>Tokohnya antara lain David Osborne dan Gaebler Banishing Bureaucracy) melahirkan ide Entrepreneural Government</p>
<p>Kajian Materialisme Karl Max bertolak dari Kajian administrasi dibantu ilmu ekonomi, sejarah dan filsafat</p>		<p>Kelompok yang mengarah pada gagasan ini disebut pa-radigma NPM sebagai lawan Paradigma OPA, kemudian terjadi reaksi balik yaitu para digma NPS yang meng-gagas administrasi public sebagai pelayan masyarakat bukan "manajer"</p>
<p>Konsep Administrasi (HODGKIN SON) di era ini kalah populer di bandingkan menegemen, sehing-ga konsep menegemen berkem-bang pesat (Taylor, Adam Smith, Weber)</p>		




Pergeseran : Administrasi Negara Administrasi Publik-Kebijakan Publik:

ADMINISTRASI NEGARA	ADMINISTRASIPUBLIK	KEBIJAKAN PUBLIK
<p>Relevansi dinamika administrasi Negara dengan lokus yang di-anggap tidak memadai</p>	<p>Aktivitas yang terjadi pada organi-sasi pemerintah dan nonpemerintah yang menjalankan fungsi pemerin-tahan menjadi perhatian ilmuwan Administrasi publik</p>	<p>Studi kebijakan public merupakan implikasi logis,karena kebijakan public merupakan output utama dari Pemerintah</p>
<p>Dominasi peran Negara menurun karena factor : 1).Dinamika politik, ekonomi,budaya, 2).Globalisasi, 3).Tuntutan demokratisasi, 4). Fenomena hybrid organization</p>	<p>Lokus administrasi public semakin jelas, lahirlah studi kebijakan public sebagai pokok perhatian ilmuwan administrasi public</p>	<p>Bagi Pemerintah kebijakan merupakan instrument pokok yang dapat dipakai untuk mempengaruhi perilaku masyarakat dalam meme-cahkan berbagai persoalan public (public affair)</p>
<p>Locus Administrasi Negara berge-ser dari birokrasi pemerintah ke organisasi public (organisasi pe-merintah dan non-pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan)</p>		





Administrasi Negara dan Kebijakan Publik

"diam" nya pemerintah juga merupakan kebijakan yaitu tidak mengambil tindakan apapun atas berbagai problem dalam masyarakat

Dalam hal pemerintah tidak mengambil kebijakan apapun karena beberapa factor :

- 1) Tindakan tersebut dipandang sebagai opsi yang efektif untuk menyelesaikan masalah (kekawatiran timbul masalah baru)
- 2) Keterbatasan pemerintah dalam hal tertentu (misalnya anggaran)
- 3) Resiko politik yang mungkin timbul akibat sebuah kebijakan
- 4) Desakan public atas sebuah masalah

Kebijakan public disusun dengan metode ilmiah untuk memecahkan masalah public, yang perumusannya terdiri dari beberapa aktifitas yaitu : Perumusan Masalah (Penyusunan Agenda), Forecasting (Formulasi Kebijakan), Rekomendasi (Adopsi Kebijakan), Pemantauan (Implementasi Kebijakan), Evaluasi (Penilai Kebijakan).



Konsep public bukan konsep yang mempunyai makna tunggal, yang dalam wacana ilmu politik dan administrasi public paling tidak dikenal adanya 5 (lima) perspektif tentang public yang akan mengkaji kembali dan melakukan revitalisasi baik pada tataran teori maupun praktis

Perspektif fluralis (the fluralist persfective); berakar pada tradisi konflik dan memandang public sebagai konfigurasi berbagai kelompok kepentingan (interest group), artinya setiap orang yang mempunyai kepentingan yang sama akan bergabung dalam kelompok kepentingan.

Perspektif Pilihan Publik (the public choice persfective) yang berakar pada tradisi pemikiran ulitarian yang sangat menekankan pada soal kebahagiaan dan kepentingan individu.





Perspektif Legislatif (the legislative perspective) berdasarkan asumsi bahwa setiap pejabat yang diangkat merupakan representasi kepentingan public, sehingga mereka mempunyai legitimasi untuk mewujudkan perspektif public di dalam administrasi public.

Perspektif Penyedia Layanan (the service providing perspective) memandang public sebagai pelanggan yang harus dilayani, dalam hal ini street-level bureaucrats mempunyai tugas sebagai ujung tombak pelayanan kepada public baik secara individu maupun kelompok.

Perspektif Warga Negara (the citizen perspective) artinya konsep kewarganegaraan merupakan salah satu pusat perhatian administrasi public modern.



Kuatnya tuntutan agar administrasi Negara (public) dapat menghasilkan sebuah kebijakan public yang berkualitas telah memicu lahirnya kajian analisis kebijakan public, yaitu disiplin ilmu social terapan yang menggunakan metode kajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan dengan kebijakan

Analisa kebijakan adalah pekerjaan menghitung, menilai dan memilih alternative kebijakan yang memiliki manfaat bersih paling tinggi untuk memecahkan masalah public dengan seperangkat kriteria dan metode tertentu



HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK



Powered by :

MATERI

EVALUASI

Dra. Rosalina Ginting, M.Si
Dr. Maryanto, M.Si
Ika Menarianti, M.Kom.

PETUNJUK Pengerjaan

- 1) Berdoalah sebelum mengerjakan soal
- 2) Klik "MULAI" untuk memulai mengerjakan soal
- 3) Pilihlah jawaban yang menurut anda benar dengan meng klik opsi jawaban yang tersedia

MULAI

- 1) Yang bukan merupakan paradigma administrasi negara adalah

- A Dokotomi Politik-Administrasi
- B Administrasi sebagai Ilmu Sosial
- C Administrasi sebagai Ilmu Politik
- D Administrasi Negara sebagai administrasi Negara

2) Tokoh yang membagi paradigma administrasi negara adalah

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| A Steve Roger | C Nicholas Henry |
| B Paul lang | D Bruce Banner |

3) Dalam dikotomi politik administrasi, pemerintah memiliki dua fungsi yaitu fungsi..... dan fungsi

- A** politik, administrasi
- B** politik, sosial
- C** administrasi, keuangan
- D** administrasi, sosial

4) Denhardt membagi paradigma administrasi Negara dalam 3 (tiga) paradigma yaitu: Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM) dan

- A** New Public Administration
- B** New Public Purchase
- C** New Public Society
- D** New Public Service

5) Dasar teori dan fondasi epistemologis pada New Public Service adalah.....

- A** Teori Demokrasi
- B** Teori Ekonomi
- C** Teori Politik
- D** Teori administrasi

6) Peran pemerintah pada New Public Management adalah

- | | |
|-------------------|---------------------|
| A Steering | C Serving |
| B Rowing | D Transiting |

7) Yang bukan merupakan faktor menurunnya dominasi peran negara adalah

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| A Globalisasi | C Dinamika politik |
| B Public Policy | D Hybrid organization |

8) Yang bukan termasuk lima perspektif publik adalah

- A perspektif fluralis
- B perspektif management
- C perspektif pilihan publik
- D perspektif legislatif

9) Perspektif yang berdasarkan asumsi bahwa setiap pejabat yang diangkat merupakan representasi kepentingan public merupakan perspektif

- A Fluralis
- B Warga Negara
- C Legislatif
- D Pilihan publik

10) Kuatnya tuntutan agar administrasi Negara (public) dapat menghasilkan sebuah kebijakan public yang berkualitas telah memicu lahirnya kajian analisis kebijakan public, yaitu

- A administrasi
- B kulturasi publik
- C kebijakan publik
- D disiplin ilmu social

lihat nilai

MANUAL PENGGUNAAN PROGRAM
PROGRAM KOMPUTER, E-MODUL INTERAKTIF MATERI “HUBUNGAN ADMINISTRASI
NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK”

1. Program Komputer, E-modul interaktif **materi “Hubungan Administrasi Negara dan Kebijakan Publik”** ini dibuat menggunakan Corel Draw dan Macromedia Flash
2. Program dibuild dalam bentuk .swf
3. Untuk menjalankan E-modul inetraktif **materi “Hubungan Administrasi Negara dan Kebijakan Publik”** digunakan Interactive Whiteboard dan Komputer
4. Dalam pemutaran produk e-modul interaktif **materi “Hubungan Administrasi Negara dan Kebijakan Publik”** perlu dipersiapkan laptop, speaker active dan LCD sehingga siswa mampu melihat, mendengarkan secara baik dan benar
5. Produk komputer berupa e-modul interaktif **materi “Hubungan Administrasi Negara dan Kebijakan Publik”** dilengkapi menu materi dan Evaluasi.
6. Pengguna juga dapat mengetahui skor yang diperoleh setelah melakukan evaluasi